

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptanya sebuah kenyamanan dan kemakmuran merupakan tujuan setiap negara. Demi mewujudkan tujuan tersebut perlu dilaksanakan kegiatan yang dapat mengubah kondisi menjadi lebih baik. Kegiatan perubahan tersebut dinamakan pembangunan.¹ Pelaksanaan pembangunan biasanya serasi dengan penekanan angka kemiskinan. Menurut Prawoto dalam Margaretha dkk, menyebut kemiskinan sebagai keadaan yang dapat mengakibatkan banyak anak tidak bisa menikmati fasilitas pendidikan, akses yang sulit bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan umum, susahnya masyarakat dalam membiayai kesehatan, banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian bahkan tempat tinggal.² Keadaan semacam itu bisa semakin parah, apabila angka kemiskinan terus meroket, karena nantinya pemerintah hanya terfokus untuk membiayai penanganan kemiskinan dan berakibat pada terkendalanya program pembangunan yang lain.³ Sehingga dari persoalan itu perlu tindakan cepat dalam menangani masalah kemiskinan.

Selaras dengan tujuan suatu negara melaksanakan pembangunan dengan mengurangi angka kemiskinan, pengadaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dinilai tepat. SDGs merupakan program pembangunan bertaraf dunia yang tanpa membedakan negara berkembang dan negara maju. Program SDGs ini hadir sebagai tanggapan dari rasa prihatin bersama demi mewujudkan negara di dunia yang memiliki rasa adil, nyaman, sejahtera serta berkelanjutan bagi umat manusia. SDGs bukan merupakan program pertama di dunia yang memiliki tujuan pembangunan global. *Millenium Development Goals* (MDGs) hadir terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaannya memiliki kesan tertutup karena hanya negara maju yang diperbolehkan ikut, dan

¹ Moh Nur Khaqiqi dan Tsalis Syaifudin, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, dan Upah Terhadap Kemiskinan," *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 25.

² Margaretha Larasati Prayoga, dkk., "Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo," *Jambura Economic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 136.

³ Rosalia Lukita Sari dan Rifki Khoirudin, "Deteminan Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura," *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2019): 127.

menjadikan negara berkembang sebagai objek dari pembangunan.⁴ Pelaksanaan program SDGs memiliki tujuh belas tujuan, yang dijadikan sasaran dalam pembangunan. Tujuan SDGs nomor satu ditempati oleh program pemusnahan kemiskinan dari segala bentuk dan di semua lokasi.⁵ Masalah kemiskinan menempati nomor urut satu dalam tujuan SDGs, bukanlah suatu alasan karena masalah kemiskinan memang masalah yang umum dihadapi oleh banyak negara didunia, baik negara maju apalagi bagi negara berkembang.⁶

Indonesia yang merupakan negara berkembang, permasalahan kemiskinan yang dihadapi pasti lebih rumit dari negara maju.⁷ Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki 38 provinsi, dimana setiap provinsi memiliki permasalahan kemiskinannya sendiri-sendiri. Telah diketahui bahwa permasalahan kemiskinan sekarang tidak hanya pada taraf nasionalnya saja, melainkan sudah memasuki daerah-daerahnya. Termasuk di Kabupaten Kudus yang mempunyai masalah kemiskinannya sendiri. Adapun data yang telah diperoleh yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Kemiskinan Kabupaten Kudus



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus

⁴ Islam Faruk Zaini dkk., “kebijakan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor Jawa Barat),” *Hasanuddin Journals of Sociology (HJS)* 3, no. 2 (2021): 127-128.

⁵ Agus Supriyanto, dkk., *Mencipta Inovasi: Inovasi Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta:Tempo Publishing, 2017), 33.

⁶ Novia Rahmawati, dkk., “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia),” *Convergence: The Journal of Economic Development* 4, no. 1 (2022): 19.

⁷ Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra. “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 629.

Dari gambar 1.1 tersebut terlihat mengenai data kemiskinan kabupaten Kudus dari tahun 2010-2022 yang fluktuatif. Berawal dari tahun 2010 menuju tahun 2011 yang mengalami peningkatan. Kemudian mulai tahun 2011 sampai tahun 2019 kemiskinan terus mengalami penurunan. Namun kemiskinan berlanjut mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai pada tahun 2021. Terjadinya peningkatan pada tahun 2019 menuju tahun 2021 ini diakibatkan karena mulai tahun tersebut, terjadi pandemi covid-19 yang menghancurkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pada saat itu kegiatan ekonomi terkendala, yang mengakibatkan jumlah tenaga yang dibutuhkan sedikit, pemutus hubungan kerja terjadi secara besar-besaran, yang kemudian tercipta masalah baru meningkatnya angka kemiskinan.⁸ Melihat keadaan semacam itu pemerintah kabupaten Kudus tidak hanya tinggal diam, banyak upaya yang telah dilaksanakan untuk memberantas kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Menurut data kemiskinan yang telah diperoleh, Kabupaten Kudus mempunyai data yang fluktuasi namun lebih cenderung mengalami penurunan. Angka kemiskinan yang cenderung menurun itu tidak dapat memberikan nilai persentase yang besar atau dapat dikatakan penurunan angka kemiskinan cukup kecil apabila dibandingkan dengan peningkatannya. Dari perihal tersebut diperlukan adanya upaya atau kebijakan yang dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan kemiskinan secara lebih optimal.

Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan guna menurunkan angka kemiskinan yaitu, dengan menggunakan kebijakan menaikkan upah minimum. Pentingnya peran upah minimum sehingga dijadikan sebagai kebijakan dalam memerangi kemiskinan, dikarenakan upah minimum dalam awal penentuannya sudah dilandaskan pada kualitas hidup layak (KHL), yang mempunyai peran guna mencukupi kebutuhan hidup terendah bagi pekerja dan keluarganya. Sehingga dapat dikatakan dengan kebijakan menaikkan upah minimum, pendapatan pekerja akan terjamin karena tidak kurang dari kualitas hidup layak yang sudah ditetapkan, dengan begitu kebutuhan hidup pekerja akan terus terpenuhi sehingga dapat terhindar dari

⁸ Novia Rahmawati, dkk., “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia),” 20.

kemiskinan.⁹ Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Boediono dalam penelitian Laga Priseptian dan Wiwin Priana mengungkapkan, menaikkan upah minimum merupakan salah satu alternatif guna meningkatkan penghasilan masyarakat dengan begitu kemakmuran masyarakat akan terjaga, selanjutnya dengan kebijakan kenaikan upah minimum nanti dapat digunakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.¹⁰

Selain kebijakan menaikkan upah minimum guna menurunkan jumlah kemiskinan, kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga perlu mendapat perhatian pemerintah, karena dengan memiliki SDM yang berkualitas, akan dapat memaksimalkan kemampuan dalam menyokong terlaksananya pembangunan nasional. Menurut Franciari dalam Muhamad paizal dkk, Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan memperbaiki pendidikan dan kesehatan masyarakat, kemudian secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Fasilitas kesehatan yang ditingkatkan oleh pemerintah bisa memberikan kemakmuran bagi masyarakat, karena dengan kesehatan prima masyarakat dengan mudah bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Selain itu peningkatan dalam sektor pendidikan nantinya akan memberikan produktivitas yang meningkat dan penghasilan yang diterima pekerja pun ikut meningkat. Hal inilah yang dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya dapat meminimalkan angka kemiskinan.¹¹ Peningkatan kualitas SDM juga dapat dikatakan sebagai pembangunan manusia yang teknik mengukurnya dengan indeks pembangunan manusia (IPM).¹²

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memperhatikan keberhasilan suatu wilayah

⁹ Muhammad Sabyan dan Rina Widyanti, "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA JAMBI," *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 8, no. 3 (2022): 312.

¹⁰ Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan," *Forum Ekonomi* 24, no. 1 (2022): 50.

¹¹ Muhamad Paizal Sahrul dkk., "Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Barat," *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance* 1 no. 2 (2021): 45.

¹² Moh Nur Khaqiqi, dan Tsalis Syaifudin, "Analisis pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan upah terhadap kemiskinan," 29.

dalam memakmurkan penduduknya.¹³ Kuncoro mengungkapkan dalam Emilia dkk, bahwa IPM juga dipakai guna membandingkan kinerja pemerintah dalam menangani pembangunan manusia di suatu daerah.¹⁴

Adapun penelitian ini tidak dapat terlepas dari penelitian yang sebelumnya sudah dilaksanakan dan dijadikan sebagai pendukung bagi penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian yang dilaksanakan Linggawati dan Wenagama tahun 2022 membuktikan bahwa peningkatan upah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.¹⁵ Hasil penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh Ria Safitri dkk, tahun 2020 menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.¹⁶ Kemudian Moh. Nur Khaqiqi dan Tsalis Syaifuddin tahun 2021 menyatakan bahwa kenaikan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.¹⁷ Ungkapan berbeda juga diutarakan oleh Margaretha dkk, dalam penelitiannya tahun 2022 yang menyatakan kebijakan upah minimum kabupaten tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.¹⁸

Kemudian untuk indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan juga banyak memiliki hasil yang berbeda dalam penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Margaretha dkk, dalam penelitian yang sama mengungkapkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif signifikan

¹³ Anandya Rahardian Nugraeni dan Tony Seno Aji, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur," *INDEPENDENT: Journal of Economics* 1, no. 2 (2021): 2.

¹⁴ Emilia Khristina Kiha, dkk., "Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten Belu," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 7 (2021): 61.

¹⁵ Ni Wayan Linggawati, dan I. Wayan Wenagama, "Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Upah Terhadap Jumlah Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kabupaten Karangasem," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11, no. 4 (2022): 408.

¹⁶ Ria Safitri, Jadzil Baihaqi dan Supriyadi, "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah," *IQTISHODUNA* 16, no. 1 (2020): 54.

¹⁷ Moh Nur Khaqiqi dan Tsalis Syaifudin, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, dan Upah Terhadap Kemiskinan," 35.

¹⁸ Margaretha Larasati Prayoga, dkk., "Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo," 140.

terhadap kemiskinan.¹⁹ Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kevin dan Zainal tahun 2022 yang membuktikan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.²⁰ Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Rizky Febrian dkk, tahun 2022 yang membuktikan indeks pembangunan manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan.²¹ Berdasarkan penelitian terdahulu inilah terlihat kesenjangan hasil dari penelitian atau terjadi hasil penelitian yang tidak konsisten dalam tempat dan waktu yang berbeda.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang diatas, peneliti berniat melaksanakan penelitian tentang **“Pengaruh Upah Minimum Kabupaten dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kudus Tahun 2010-2022”** dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari kebijakan kenaikan upah minimum dan kebijakan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2010-2022.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat diputuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dari kebijakan kenaikan upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2010-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh dari kebijakan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2010-2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu, sebagai berikut:

¹⁹ Margaretha Larasati Prayoga, dkk., “Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo,” 141.

²⁰ Kevin Dwi Prasetyo dan Zainal Arifin. “Analisis Pengaruh TPT, UMP, Pertumbuhan Ekonomi, IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 6, no. 2 (2022): 301.

²¹ Rizky Febrian Saragih dkk., “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021”. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 77.

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh kebijakan kenaikan upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2010-2022.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh kebijakan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2010-2022.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat diambil manfaat yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai khasanah ilmu pembangunan ekonomi, terkhusus mengenai kebijakan (kenaikan upah minimum kabupaten dan indeks pembangunan manusia) yang dapat digunakan dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan. Serta kebijakan mana yang lebih berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan.
2. Manfaat praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang kebijakan yang hendak dilakukan bagi pemangkungnya, dalam mengurangi angka kemiskinan. Selain itu penelitian ini dapat juga digunakan sebagai ide bagi peneliti selanjutnya, dengan harapan dapat mengembangkan penelitian yang sudah dilaksanakan.

E. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat guna memudahkan para pembaca untuk memahami segala isi keseluruhan dari penelitian ini.

1. Bagian Awal
Memuat halaman judul, lembar persetujuan pembimbing skripsi, lembar pengesahan munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, transliterasi Arab latin, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.
2. Bagian Isi
Pada bagian ini memuat lima bab yang menjadi inti dari penelitian ini, adapun lima bab itu terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, serta berisi tentang saran yang dapat diberikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini seperti, pemerintah kabupaten Kudus ataupun bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini merupakan bagian paling akhir dari penelitian yang berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup dari peneliti.